



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : TATANG MUTTAQIN
- Jabatan : STAF AHLI BIDANG MANAJEMEN TALENTA
- NHK : 713526

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.591.500.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/100 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 814.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 865.000.000
- Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 807.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 111.000.000

- MOBIL, TOYOTA RUSH S Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
- MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 41.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 486.880.451

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.230.480.451

III. HUTANG

Rp. 82.993.983

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.147.486.468

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.